

ADA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN

Bawaslu Usul Tunda Pilkada Serentak 2024

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas, karena pelaksanaannya berisiran dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagia, sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu RI di Jakarta, Kamis (13/7), merasa khawatir.

"Sebenarnya Pilkada 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan

menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan Pilkada, karena ini pertama kali serentak.

Ia mencontohkan apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain, karena daerah lain juga tengah menyelenggarakan Pilkada. "Kalau sebelumnya, misalnya, Pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau

polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," terangnya.

Hal tersebut, juga disampaikan Bagia dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) bertema 'Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangan-nya', di Jakarta, Rabu (12/7).

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI memaparkan sejumlah potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, potensi permasalahan itu muncul dari tiga aspek, yakni penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan) dan pemilih. **(Ant/Obi)-f**

Polri Serahkan SPDP Denny Indrayana ke Kejagung

JAKARTA (KR) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem Pemilu Legislatif dengan terlapor Denny Indrayana kepada Kejaksaan Agung.

"Terkait kasus saudara DI (Denny Indrayana, Red) saat ini di tanggal 10 Juli 2023 penyidik telah melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis (13/7).

Ramadhan menyebut dengan telah dilimpahkannya SPDP tersebut, maka pe-

nanganan perkara dugaan kebocoran putusan MK tentang uji materi sistem Pemilu sudah dalam tahap penyidikan.

Terkait kapan Denny Indrayana akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, Ramadhan menyebut tahap tersebut dalam berproses mengingat SPDP baru saja diserahkan per tanggal 10 Juli kemarin. "Ya (panggilan) nanti akan berproses ya, tanggal 10 Juli kemarin (SPDP diserahkan)," ujarnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana menyatakan telah menerima SPDP dari Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas nama pengguna akun Twitter berinisial DI (Denny Indrayana).

(Ant)-d

PANIRADYA TERUS MENDORONG Kalurahan Manfaatkan BKK Pertanian



KR-Wawan Isnawan

Rembag Kaistimewan bertema 'BKK Pertanian Tertib Administrasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Pengurangan Kemiskinan'.

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menetapkan 11 kebijakan strategis dalam urusan keistimewaan, yang salah satunya yaitu terkait implementasi tertib administrasi tanah kas desa. Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis tersebut, maka diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanian yang bersumber dana keistimewaan (danais) dari Pemda DIY kepada Pemerintah Kalurahan.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI mengatakan, program tertib administrasi tanah kas desa dengan dukungan BKK Danais Kalurahan harapannya bisa diterapkan di semua kalurahan di DIY yang jumlahnya 392 kalurahan. Namun belum semua Pemerintah Kalurahan menanggapi tawaran tersebut, sehingga saat ini pihaknya fokus pada kapanewon miskin.

"Saat ini ada 15 kapanewon miskin yang intensif kita ajak berdiskusi untuk menggunakan salah satu kebijakan strategis dari gubernur tersebut," terang Aris dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'BKK Pertanian Tertib Administrasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Pengurangan Kemiskinan'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepa-

tihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (13/7) dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. Kegiatan podcast ini didanai dengan dana keistimewaan.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber lain Lana SPd (Lurah Kalirejo Kokap Kulonprogo), Agus Prasetyo AMD (Lurah Merdikorejo Tempel Sleman) dan Badri Yanto SE (Petani Milenial Kalurahan Merdikorejo) dipandu Ninda Fillasputri.

Acara dimeriahkan *special performance* Madha Soentoro dan Sanggar Sekar Wilasita. Para peserta (Sahabat Istimewa) yang mengikuti podcast rembag kaistimewan bisa mendapat *free e-sertifikat* dari Corporate University Paniradya Kaistimewan dengan mengisi *form* di kolom *chat* di *channel* YouTube Paniradya.

Menurut Aris, untuk memanfaatkan BKK Pertanian ini, setiap kalurahan mengirimkan proposal berikut rencana anggaran belanja (RAB) program yang akan dijalankan. Pemda DIY kemudian akan menindaklanjuti proposal tersebut dengan melakukan klarifikasi dan berdiskusi dengan lurah selaku penanggungjawab program, agar sesuai dengan kebijakan strategis gubernur dan sesuai tujuan keistimewaan yaitu menyejahterakan masyarakat.

"Karena bagaimanapun setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada laporan pertanggungjawaban kinerja, nantinya kita evaluasi apa-

kah berlanjut atau tidak," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Aris, BKK Pertanian baru berlangsung dua tahun, di mana tahun-tahun pertama masih seputar pertanian dan yang ditanam pun masih spesifik yaitu Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH). Namun di tahun 2023 ini lebih berkembang ditambah pertanian dan perikanan.

Aris menekankan pentingnya tertib administrasi pertanian, sehingga kalau tanah kas desa untuk pertanian, maka harus betul-betul dimanfaatkan untuk pertanian, jangan diubah untuk yang lain. Pihaknya juga mengajak para lurah untuk memastikan pemanfaatan tanah kas desa sesuai peruntukan, bukan malah disewakan.

Adapun terkait keterlibatan petani milenial dalam pengelolaan BKK Pertanian, menurut Aris, hal ini dilakukan lantaran di sektor pertanian kebanyakan penggarapnya adalah petani yang sudah tua. "Hadirnya petani milenial ini diharapkan terjadi kolaborasi positif antara pemerintah kalurahan, para petani tua, warga miskin dan petani muda (milenial)," harap Aris.

Lana mengatakan, jumlah keluarga yang tergolong miskin di Kalurahan Kalirejo tergolong masih tinggi, sehingga BKK Pertanian sangat dirasakan manfaatnya. Kalurahan memilih memanfaatkan tanah kas desa dengan dukungan BKK Pertanian untuk menanam ja-

gung dan budidaya ikan lele.

Menurutnya, penanaman jagung dilakukan saat musim penghujan, sedangkan untukantisipasi kekeringan, maka dikolaborasi dengan ternak lele. "Saat ini penggarapnya adalah 40 warga miskin, dan kami berharap program ini berhasil dan berkelanjutan, sehingga makin banyak warga miskin yang terangkat ekonominya dari danais," katanya.

Sedangkan Agus Prasetyo mengatakan, BKK Pertanian di kalurahanannya digunakan untuk budidaya cabai, mentimun dan melon dengan sistem tumpang sari. Jadi sebelum cabai panen, mentimun dan melon sudah panen duluan. Untuk panen mentimun dan melon kemarin mendapatkan sekitar Rp 50 juta (pendapatan kotor).

"Kami memilih cabai, mentimun dan melon, karena salak pondoh sebagai produk unggulan kurang laku saat Ramadan dan Lebaran kemarin, ini bisa jadi alternatif bagi petani," katanya.

Sementara Badri Yanto menuturkan, antusiasme pemda di Kalurahan Merdikorejo untuk mengolah pertanian dengan dukungan BKK Pertanian ini, cukup tinggi. Saat ini ada empat petani milenial yang terlibat. "Dengan keterlibatan petani milenial ini, maka terjadi regenerasi. Apalagi sudah dimodali lewat BKK danais, sehingga kami hanya mengeluarkan tenaga saja," katanya. **(Dev/Wan)**

KELOMPOK JAGA WARGA

Mitra Pemerintah Jaga Keamanan, Ketertiban, Ketenteraman Masyarakat



KR-Devid Permana

Sekretaris Satpol PP DIY, Arief Rachman Hakim SS MAP MPP menyerahkan bantuan Handy Talky (HT) melalui danais kepada kelompok Jaga Warga.



KR-Devid Permana

Kelompok Jaga Warga penerima bantuan Handy Talky.

GUNUNGKIDUL (KR) - Kelompok Jaga Warga menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Daerah DIY dan stakeholder, terutama Satpol PP DIY dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Oleh sebab itu, Jaga Warga diposisikan sebagai subjek (bukan objek) dalam upaya tersebut.

"Sebagai mitra, maka kedudukan Jaga Warga setara dengan kami (Satpol PP), sehingga masukan dari teman-teman Jaga Warga memiliki arti penting bagi kami. Kami berharap sinergitas dan komunikasi antara Jaga Warga dan stakeholders semakin terjalin kuat," terang Sekretaris Satpol PP DIY, Arief Rachman Hakim SS MAP MPP dalam acara Jagongan Jaga Warga di Balai Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan Gunungkidul, Kamis (13/7).

Jagongan Jaga Warga edisi kali ini mengangkat tema 'Sinergi Jaga Warga dengan Stakeholder Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman'. Acara menghadirkan narasumber lain, Endah Subekti Kuntariningsih SE (Ketua DPRD Gunungkidul) dan Nugraha Wahyu Winarna SP MSc (Kepala Bidang Urusan Kebudayaan Paniradya Kaistimewan DIY).

Jagongan Jaga Warga di-

biayai dengan dana keistimewaan (danais) dihadiri ratusan peserta, terdiri anggota Jaga Warga, dukuh, lurah dan panewu di Gunungkidul. Di sela acara dilakukan penyerahan bantuan Handy Talky (HT) melalui danais kepada kelompok Jaga Warga.

Menurut Arief Rachman Hakim, Jaga Warga merupakan aset penting sekaligus ujung tombak dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. Karena yang paling paham dengan kondisi masyarakat di lingkungannya masing-masing adalah anggota Jaga Warga itu sendiri. "Dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman di masyarakat, Satpol PP tidak hanya bersinergi secara formal dengan TNI, Polri dan Pemerintah Daerah, tapi juga bekerja sama dengan Jaga Warga. Karena kami memahami bahwa partisipasi masyarakat punya andil signifikan. Kami tidak melupakan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Arief, kerja sama yang baik bisa dibuktikan dengan bertambahnya nilai. Bagi Satpol PP yang jumlah personelnnya terbatas, keberadaan kelompok Jaga Warga jelas sangat membantu dalam mewujudkan kondusifitas lingkungan. "Kata sinergi punya arti membangkitkan sesuatu. Proses interaksi ini diharapkan menghasilkan harmoni,

sehingga bisa lebih optimal dalam mencapai tujuan bersama," ujarnya.

Dijelaskan Arief, kelompok

ini jelas menambah kekuatan melalui pelibatan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan



KR-Devid Permana

Jagongan Jaga Warga bertema 'Sinergi Jaga Warga dengan Stakeholder Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman' di Balai Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan Gunungkidul.

pok Jaga Warga dibentuk di tingkat padukuhan, dengan jumlah anggota maksimal 25 orang setiap kelompok, dan DIY memiliki 4.673 padukuhan. "Dari data kami, saat ini sudah terbentuk sebanyak 3.091 kelompok Jaga Warga. Jika dikalikan 25, maka ang-

ketenteraman," katanya.

Nugraha Wahyu Winarna mengatakan, budaya gotong royong masyarakat DIY sangat tinggi, sehingga keberadaan Jaga Warga diharapkan semakin menguatkan budaya itu. "Masyarakat kita punya nilai-nilai luhur dan ke-

arifan lokal yang luar biasa. Itu harus terus kita jaga dan lestarikan," katanya.

Menurut Nugraha, Paniradya Kaistimewan DIY

2021, Paniradya atas izin Gubernur DIY dan masukan dari berbagai pihak (OPD), dimulai untuk menyelenggarakan Jaga Warga melalui danais," katanya.

Tahun 2021, saat pandemi Covid-19, diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari danais bagi 392 kalurahan dan kelurahan melalui Jaga Warga untuk penanganan Covid dengan besaran Rp 50-145 juta per kalurahan disesuaikan status zona. Selepas pandemi, program Jaga Warga tetap dilanjutkan, mengingat keamanan dan keterlindungan warga perlu terus diupayakan.

Lebih lanjut disampaikan Nugroho, dengan Jaga Warga diharapkan masyarakat bisa memitigasi dan menyelesaikan segala persoalan sosial di lingkungan masing-masing, yaitu dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong. Apalagi memasuki tahun politik, Jaga Warga juga diharapkan berperan mengedukasi pemilih aktif untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas lingkungan.

"Pemerintah mendukung Jaga Warga dengan memberikan bantuan dan fasilitas, seperti rompi dan HT serta bantuan operasional yang bersumber dari danais. "Kami (Paniradya) terus melihat perkembangannya

dan melakukan evaluasi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membukukan ke Pemerintah Pusat bahwa danais betul-betul berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Dengan begitu akan lebih banyak lagi danais yang digelontorkan untuk DIY dan didistribusikan ke masyarakat," harapnya.

Endah Subekti Kuntariningsih mengapresiasi Pemda DIY melalui Paniradya Kaistimewan DIY yang telah memfasilitasi Jaga Warga dengan pengadaan rompi dan HT melalui danais. Menurutnya, keberadaan HT ini sangat penting untuk menunjang komunikasi dan koordinasi. "Saat ada bencana dan jaringan komunikasi selular tidak berfungsi, HT ini bisa diandalkan untuk berkoordinasi sehingga tanggap darurat bisa dilakukan dengan cepat," katanya.

Menurutnya, persoalan sosial di tengah masyarakat bisa diselesaikan dengan baik, manakala terjalin sinergi yang kuat antara Jaga Warga dengan stakeholder, Pemerintah Daerah, Satpol PP, TNI Polri. Keberadaan Jaga Warga ini membantu aparat pemerintah dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. **(Dev)**